BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Tatah Makmur adalah sebuah kecamatan yang secara administratif berada di Kabupaten Banjar, salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kecamatan ini merupakan bagian dari upaya pemekaran wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mempermudah koordinasi administratif di tingkat lokal. Pemekaran ini berasal dari wilayah kecamatan induk, yaitu Kertak Hanyar, yang sebelumnya memiliki cakupan wilayah cukup luas dan beragam. Dengan adanya pemekaran, maka wilayah-wilayah yang dulunya termasuk dalam Kertak Hanyar kini terbagi menjadi wilayah kecamatan yang lebih kecil dan spesifik, salah satunya adalah Tatah Makmur.

Pada awalnya, nama yang diajukan untuk kecamatan baru ini adalah “Lingkar Selatan.” Nama tersebut didasarkan pada posisi geografis wilayah yang terletak di bagian selatan lingkar Kabupaten Banjar. Namun, setelah melalui kajian sejarah dan pertimbangan mendalam mengenai asal-usul dan nilai-nilai lokal yang melekat pada daerah tersebut, nama “Lingkar Selatan” kemudian diubah menjadi “Tatah Makmur.” Nama “Tatah Makmur” lebih menggambarkan identitas kultural dan historis masyarakat setempat,

sekaligus menjadi simbol harapan dan cita-cita bagi kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Secara luas, kecamatan Tatah Makmur memiliki total luas wilayah sekitar 35,47 km². Meskipun wilayahnya relatif kecil jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Banjar, Tatah Makmur memiliki arti penting secara strategis dalam struktur pemerintahan dan sosial di daerah ini. Wilayah Tatah Makmur terdiri dari 13 desa yang masing-masing memiliki karakteristik unik, baik dari segi budaya, adat, maupun potensi sumber daya alam dan sosialnya. Desa-desa tersebut adalah Tatah Bangkal, Layap Baru, Tampang Awang, Pemangkih Baru, Tatah Pemangkih Darat, Jaruju Laut, Tatah Jaruju, Taibah Raya, Tatah Pemangkih Tengah, Tatah Layap, Mekar Sari, Pandan Sari, dan Tatah Bangkal Tengah.

Keberadaan 13 desa ini menunjukkan adanya keragaman sosial dan budaya yang tinggi di kecamatan Tatah Makmur. Setiap desa memiliki peranan penting sebagai pusat kehidupan masyarakat lokal, di mana berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya berlangsung secara dinamis. Desa-desa tersebut menjadi lokasi utama bagi masyarakat untuk mengembangkan kehidupan sehari-hari, mulai dari bercocok tanam, berdagang, menjalankan adat istiadat, hingga mengelola berbagai program pembangunan desa. Setiap desa juga memiliki satu pangkalan distribusi gas LPG 3 kg yang menjadi akses penting dalam pemenuhan kebutuhan energi rumah tangga. Pengantaran gas ke masing-masing pangkalan ini dilakukan secara rutin

setiap dua minggu sekali, sehingga mendukung kestabilan pasokan dan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas.

B. Hasil Penelitian

Untuk menjelaskan tentang penetapan harga gas LPG 3 kg di pangkalan, maka penulis akan menetapkan beberapa pangkalan gas LPG yang menjual gas tersebut ke pembeli (masyarakat). Maka penulis mengambil 3 pangkalan gas LPG yang berbeda untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan penjelasan pada BAB IV ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan di 3 pemilik pangkalan yaitu :

1. Informan pertama

Nama : Fera

Alamat : Tatah Bangkal

Umur : 52

Pekerjaan : Petani

Sebagai bagian dari upaya untuk memahami lebih jauh peran pangkalan LPG dalam kehidupan masyarakat, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Fera, pemilik salah satu pangkalan yang berada di Desa Tatah Bangkal. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya menggali informasi mengenai alasan pendirian usaha, tujuan yang ingin dicapai, serta manfaat yang dirasakan masyarakat dari keberadaan pangkalan tersebut. Penjelasan lengkap dari hasil wawancara bersama Ibu Fera di bawah ini:

“Saya memulai usaha pangkalan gas LPG 3 kg ini karena ingin menambah pemasukan untuk keluarga, sekaligus membantu warga sekitar. Di daerah

saya, cukup sulit untuk mendapatkan gas LPG distribusinya terbatas dan warga sering harus membelinya di tempat yang jauh. Dari situ saya terpikir, kenapa tidak membuka usaha sendiri saja? Dengan begitu, masyarakat sekitar bisa lebih mudah mendapatkan gas untuk kebutuhan sehari-hari, tanpa harus repot mencari ke tempat lain.” (Ibu Fera, Komuniasi Pribadi, 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa alasan utama pemilik pangkalan dalam membuka usaha pangkalan gas LPG 3 kg adalah untuk menambah pemasukan keluarga sekaligus memberikan kemudahan akses bagi masyarakat sekitar terhadap kebutuhan gas LPG. Keterbatasan distribusi dan jauhnya lokasi pembelian sebelumnya menjadi dorongan kuat bagi narasumber untuk membuka usaha sendiri, dengan tujuan membantu warga memperoleh gas LPG secara lebih mudah dan terjangkau. Selain manfaat yang dirasakan warga sejak adanya pangkalan gas ini, penting juga untuk melihat kondisi terkait kendala dalam akses dan biaya distribusi gas LPG. Penjelasan lengkap dari hasil wawancara bersama Ibu Fera di bawah ini:

“Harga jual gas di pangkalan saya memang sedikit lebih tinggi, yaitu Rp23.000 per tabung. Penetapan harga ini tidak asal, melainkan berdasarkan sejumlah kendala yang kami hadapi di lapangan, terutama terkait akses jalan menuju lokasi pangkalan. Mobil pengangkut dari Pertamina tidak bisa menjangkau tempat kami karena kondisi jalan yang sempit dan tidak memungkinkan untuk dilalui kendaraan besar. Akibatnya, saya harus menyewa kelotok atau perahu kecil dengan biaya Rp200.000 sekali angkut untuk memindahkan gas dari titik akhir yang bisa dijangkau mobil ke pangkalan. Selain itu, ada juga biaya buruh: Rp500 per tabung untuk memindahkan gas dari mobil ke kelotok, dan Rp1.000 per tabung dari kelotok ke pangkalan. Semua ini menambah beban biaya operasional yang cukup signifikan.” (Ibu Fera, Komuniasi Pribadi, 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemilik pangkalan gas LPG, diketahui bahwa harga jual gas sebesar Rp23.000 per tabung ditetapkan karena adanya kendala akses distribusi ke lokasi pangkalan. Jalan menuju

pangkalan terlalu sempit sehingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan besar seperti mobil pengangkut milik Pertamina. Oleh karena itu, pemilik pangkalan harus menyewa kelotok atau perahu kecil dengan biaya Rp200.000 sekali angkut untuk membawa gas dari titik akhir yang dapat dijangkau kendaraan ke lokasi pangkalan. Selain itu, terdapat biaya buruh tambahan sebesar Rp500 per tabung untuk proses pemindahan dari mobil ke kelotok, dan Rp1.000 per tabung dari kelotok ke pangkalan. Kendala geografis dan biaya tambahan inilah yang menjadi alasan utama di balik penetapan harga jual yang lebih tinggi di pangkalan tersebut.

Setelah menjelaskan mengenai kendala akses dan biaya tambahan dalam proses distribusi, selanjutnya Ibu Fera menjelaskan adanya kesepakatan yang telah dibangun bersama masyarakat sekitar. Ibu Fera juga mengungkapkan sejumlah dampak positif yang telah dirasakan dari usaha yang dijalankannya.

“Secara aturan, memang ada ketentuan dari Pertamina mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET), dan penjualan di atas harga tersebut bisa dikenai sanksi. Namun, dalam kondisi seperti ini, saya telah berdiskusi langsung dengan masyarakat sekitar dan menjelaskan secara terbuka mengenai tantangan serta biaya tambahan yang harus saya tanggung. Alhamdulillah, masyarakat memahami situasinya dan menyetujui harga jual di pangkalan kami. Mereka justru merasa terbantu karena tidak perlu bersusah payah mencari gas ke tempat yang lebih jauh. Dengan adanya usaha ini, distribusi gas menjadi lebih lancar di wilayah kami, dan masyarakat pun merasa lebih nyaman serta terbantu dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari.” (Ibu Fera, Komuniasi Pribadi, 2025)

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara regulasi terdapat ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Pertamina, pelaku usaha merasa perlu melakukan penyesuaian harga karena adanya biaya tambahan dalam proses distribusi. Namun, penyesuaian ini dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat melalui diskusi langsung, sehingga tercipta pemahaman

bersama. Masyarakat menyetujui harga yang ditetapkan karena mempertimbangkan kemudahan akses dan kestabilan pasokan gas di wilayah mereka. Keberadaan pangkalan ini pada akhirnya justru membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari dengan lebih efisien dan nyaman.

2. Informan kedua

Nama : Halidi

Alamat : Bangkal Tengah

Umur : 52

Pekerjaan : Petani

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak halidi, pemilik pangkalan kedua yang berada di desa bangkal tengah. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya menggali informasi mengenai alasan pendirian usaha, tujuan yang ingin dicapai, serta manfaat yang dirasakan masyarakat dari keberadaan pangkalan tersebut. Penjelasan lengkap dari hasil wawancara bersama bapak halidi di bawah ini:

"Alasan utama saya membangun usaha ini adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dapat menunjang kebutuhan ekonomi keluarga saya. Saya melihat peluang usaha ini cukup menjanjikan karena gas LPG merupakan kebutuhan pokok hampir setiap rumah tangga. Permintaan terhadap gas LPG relatif stabil, bahkan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Namun, selain dari sisi keuntungan, saya juga memiliki niat untuk membantu masyarakat, terutama di sekitar lingkungan tempat tinggal saya, agar lebih mudah dalam memperoleh gas LPG. Sebelumnya, banyak warga yang harus pergi cukup jauh atau menunggu lama untuk mendapatkan gas, terutama saat pasokan sedang terbatas. Dengan adanya usaha ini, saya berharap bisa memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan turut serta dalam menjaga ketersediaan gas di daerah ini. Jadi, selain untuk kepentingan pribadi dalam hal finansial, saya juga melihat usaha ini sebagai bentuk kontribusi saya terhadap kebutuhan masyarakat. Harapannya, usaha ini dapat berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi di masa mendatang." (Bapak Halidi, Komunikasi Pribadi, 2025)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pelaku usaha memiliki dua tujuan utama dalam menjalankan usahanya, yaitu untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi serta sekaligus memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, motif ekonomi tidak semata-mata menjadi landasan usaha, tetapi juga disertai dengan kesadaran akan pentingnya peran distribusi LPG bagi kebutuhan dasar rumah tangga di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara orientasi bisnis dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah yang mungkin belum sepenuhnya terjangkau oleh jaringan distribusi energi resmi secara merata. Bapak Halidi juga menjelaskan peran distribusi sebagai berikut:

“Harga jual gas LPG di pangkalan kami adalah Rp22.000 per tabung. Sebenarnya, harga yang ditetapkan oleh Pertamina adalah Rp18.500, namun karena kondisi akses jalan yang sulit, distribusi gas harus dilakukan melalui dua tahap transportasi, yaitu menggunakan mobil Pertamina dan kemudian dilanjutkan dengan kelotok (perahu kecil). Hal ini menyebabkan adanya biaya tambahan distribusi.” (Bapak Halidi, Komuniasi Pribadi, 2025)

Dari hasil wawancara ini adanya tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur yang secara langsung berdampak pada proses distribusi gas LPG ke wilayah tersebut. Biaya tambahan yang timbul akibat keharusan menggunakan dua moda transportasi yakni mobil darat dan kelotok air menjadi alasan utama di balik penetapan harga jual yang lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, pelaku usaha melakukan penyesuaian harga untuk menutupi ongkos distribusi yang tidak terhindarkan, sekaligus mempertahankan kelangsungan operasional usahanya. Keputusan ini menunjukkan bahwa faktor lokasi geografis memiliki peran signifikan dalam

mempengaruhi struktur biaya dan pada akhirnya menentukan harga jual produk energi seperti LPG. Bapak Halidi juga menjelaskan adanya pendekatan komunikasi dan negosiasi sebagai berikut:

“Harga ini telah disepakati bersama masyarakat. Saya juga telah menjelaskan kepada masyarakat bahwa jika mereka ingin gas LPG tetap tersedia di daerah ini, maka harga Rp22.000 harus diterima. Jika masyarakat tidak setuju, maka kami akan menghentikan penyediaan gas LPG di pangkalan ini. Namun, karena masyarakat menyetujui harga tersebut, maka usaha ini tetap berjalan. Meski sebenarnya ada sanksi jika menjual di atas HET (Harga Eceran Tertinggi), tapi dalam dunia usaha tentu kami juga mempertimbangkan agar tidak mengalami kerugian. Semua ini telah dibicarakan dan disepakati bersama masyarakat.” (Bapak Halidi, Komuniiasi Pribadi, 2025)

Dari wawancara ini, terlihat bahwa pelaku usaha telah melakukan pendekatan komunikasi dan negosiasi langsung dengan masyarakat sebagai konsumen, guna mencapai kesepakatan bersama terkait penyesuaian harga. Meskipun harga tersebut secara teknis melebihi HET yang ditetapkan oleh Pertamina, masyarakat tetap menyetujuinya karena memahami kondisi distribusi dan pentingnya keberlanjutan pasokan gas LPG di daerah mereka. Dalam hal ini, pelaku usaha menekankan aspek keterbukaan dan kesepakatan bersama sebagai justifikasi moral atas pelanggaran regulasi harga. Pernyataan ini juga mencerminkan dilema umum yang dihadapi oleh pelaku distribusi LPG di daerah terpencil, yakni antara mematuhi kebijakan harga resmi dan mempertahankan kelangsungan usaha agar tidak merugi. Praktik ini membuka ruang diskusi mengenai fleksibilitas regulasi dalam konteks daerah dengan kondisi geografis khusus.

3. Informan ketiga

Nama : Zainal Hakim

Alamat : Pandan Sari

Umur : 31

Pekerjaan : Petani

Pangkalan ketiga merupakan pangkalan milik Bapak Zainal dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu pemilik pangkalan LPG di desa Pandan Sari, Bapak Zainal menjelaskan latar belakang dan alasan utama membangun usahanya di bidang distribusi gas LPG. Menurutnya, membuka usaha ini merupakan bagian dari upayanya untuk memperoleh penghasilan tambahan, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan gas LPG bersubsidi. Bapak Zainal menyampaikan:

“Alasan saya membangun usaha ini adalah untuk mendapatkan keuntungan serta memiliki usaha tambahan. Saat ini, saya menjual gas LPG di pangkalan dengan harga Rp21.000 per tabung. Sebenarnya, harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pertamina adalah Rp18.500.” (Bapak Zainal, Komuniasi Pribadi, 2025)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi utama pelaku usaha adalah ekonomi, yaitu untuk memperoleh penghasilan dan memperluas sumber pemasukan. Meskipun menyadari adanya ketentuan resmi dari Pertamina mengenai HET, pelaku usaha memilih menetapkan harga jual yang lebih tinggi, dengan pertimbangan tertentu yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Selanjutnya, bapak Zainal menjelaskan lebih rinci alasan di balik keputusan menjual LPG di atas harga eceran tertinggi yang telah ditentukan. Menurutnya, terdapat beban biaya operasional yang tidak dapat dihindari, dan jika bapak Zainal

memaksakan menjual sesuai HET, maka usaha tersebut tidak akan mampu bertahan secara finansial. bapak zainal menyatakan:

“Saya menjual di atas HET karena ada beberapa faktor yang memengaruhinya. Salah satu faktor utama adalah biaya operasional, khususnya untuk membayar gaji karyawan. Saya mempekerjakan 1 sampai 2 orang untuk membantu memindahkan tabung gas dari mobil Pertamina ke pangkalan. Jika saya menjual dengan harga sesuai HET, maka saya akan mengalami kerugian, karena tidak bisa menutupi biaya tenaga kerja tersebut.” (Bapak Zainal, Komuniasi Pribadi, 2025)

Berdasarkan wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa harga jual yang melebihi HET dipengaruhi oleh faktor teknis dan ekonomi yang cukup signifikan, terutama terkait dengan biaya operasional. Keberadaan tenaga kerja tambahan menjadi kebutuhan pokok dalam proses bongkar muat tabung gas, dan hal ini menimbulkan beban biaya yang membuat HET menjadi tidak realistis jika diterapkan sepenuhnya tanpa subsidi tambahan dari pihak lain.

bapak zainal juga menyampaikan bahwa sangat memahami adanya regulasi dan sanksi yang mengatur tentang penjualan LPG bersubsidi di atas HET. Namun, menurutnya, kenaikan harga yang diterapkan masih dalam batas wajar dan memiliki alasan yang kuat. bapak zainal menekankan bahwa tujuan utama dari penyesuaian harga tersebut bukan untuk merugikan masyarakat, tetapi justru untuk mempertahankan kelangsungan usaha yang juga berdampak pada kelancaran distribusi gas LPG. Bapak zainal mengatakan:

“Saya menyadari bahwa secara aturan ada sanksi jika menjual di atas HET. Namun, kenaikan harga yang saya lakukan masih dalam batas wajar, dan tujuannya semata-mata untuk menutupi biaya operasional. Bahkan dengan harga Rp21.000, masyarakat termasuk yang kurang mampu masih lebih memilih membeli di pangkalan saya daripada di pengecer yang menjual dengan harga jauh lebih tinggi.” (Bapak Zainal, Komuniasi Pribadi, 2025)

Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha memiliki kesadaran terhadap penetapan harga, namun ia juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi lokal. Kenaikan harga dilakukan bukan semata untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk menjaga keberlanjutan usaha sekaligus tetap menyediakan alternatif harga yang lebih terjangkau dibandingkan pengecer non-resmi. Hal ini menunjukkan adanya dilema antara kepatuhan terhadap regulasi dan kebutuhan untuk menjaga operasional usaha agar tetap berjalan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa praktik penjualan LPG di atas HET oleh pelaku usaha pangkalan didorong oleh realitas biaya operasional yang tinggi dan keterbatasan margin keuntungan. Meskipun tindakan ini secara formal bertentangan dengan ketentuan HET yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pertamina, pelaku usaha berupaya menyeimbangkan antara keberlangsungan bisnis dan pelayanan kepada masyarakat. Fenomena ini mengindikasikan pentingnya evaluasi ulang terhadap struktur biaya dan mekanisme distribusi LPG, agar regulasi yang diterapkan dapat lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Berikut hasil wawancara dengan 3 masyarakat sekitar di pangkalan FERA:

1. Masyarakat yang membeli di pangkalan Fera

Nama : Zahra

Alamat : Tatah Bangkal

Umur : 41

Pekerjaan : Petani

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa warga. Salah satu informan yang memberikan keterangannya adalah Ibu Zahra, seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di sekitar pangkalan Fera. Ibu Zahra termasuk pengguna rutin gas LPG 3 kg yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan memasak sehari-hari. Dalam wawancara tersebut, Ibu Zahra mengungkapkan berbagai aspek yang di alami, mulai dari harga jual, pemahamannya terhadap harga eceran tertinggi (HET), hingga harapannya kepada pemerintah. Ibu Zahra mengatakan:

“Saya menggunakan gas LPG ukuran 3 kilogram untuk kebutuhan memasak di rumah setiap harinya, dan biasanya saya membelinya langsung di pangkalan Fera yang dekat dari tempat tinggal saya. Harga yang saya bayar untuk satu tabung gas tersebut adalah sebesar Rp 23.000. Namun, saya pribadi sebenarnya tidak mengetahui secara pasti berapa harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. Selama ini saya hanya mengikuti harga yang berlaku di pangkalan tanpa pernah bertanya atau mencari tahu apakah harga tersebut sesuai dengan aturan yang ada.” (Ibu Zahra, Komuniasi Pribadi, 2025)

Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa Ibu Zahra sebagai konsumen masih kurang mendapatkan informasi mengenai kebijakan harga gas LPG 3 kg yang ditetapkan oleh pemerintah. Ibu Zahra membeli gas dengan harga Rp 23.000 per tabung tanpa mengetahui apakah harga tersebut telah melampaui HET. Ketidaktahuan ini bukan sepenuhnya karena kelalaian konsumen, tetapi dapat menjadi indikator dari lemahnya penyebaran informasi resmi kepada masyarakat terkait kebijakan harga barang subsidi. Ketergantungan pada harga yang ditetapkan pangkalan tanpa verifikasi lebih lanjut juga memperlihatkan lemahnya posisi tawar masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah.

Setelah peneliti menjelaskan mengenai besaran HET yang berlaku untuk wilayah tersebut, Ibu Zahra menunjukkan reaksi kecewa dan merasa terbebani

dengan harga yang selama ini ia bayarkan, yang ternyata berada di atas ketentuan resmi.

“Saya menggunakan gas LPG 3 kg, dan saya membeli dengan harga Rp 23.000 namun saya tidak mengetahui secara pasti berapa harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setelah saya tahu, ternyata harga yang dijual di pangkalan melebihi HET tersebut. Hal ini membuat saya merasa keberatan, karena saya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Saya berharap agar harga gas LPG 3 kg bisa diturunkan atau setidaknya dijual sesuai dengan harga resmi dari pemerintah. Selain itu, saya juga berharap tidak terjadi kelangkaan gas LPG. Kalau bisa, pemerintah menambah pasokan gas LPG di pangkalan agar masyarakat mudah mendapatkannya.” (Ibu Zahra, Komuniasi Pribadi, 2025)

Dari wawancara ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara harga jual di lapangan dengan HET pemerintah berdampak langsung terhadap beban ekonomi masyarakat kecil. Ibu Zahra merasa dirugikan setelah menyadari bahwa selama ini membayar lebih mahal untuk barang bersubsidi. Perasaan keberatan ini sangat wajar, mengingat tujuannya pemerintah memberikan subsidi adalah untuk membantu meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah. Ketika subsidi tidak sampai sesuai sasaran karena praktik harga yang tidak diawasi, maka niat baik kebijakan pemerintah menjadi tidak efektif. Ibu Zahra juga menekankan bahwa penggunaan gas LPG adalah kebutuhan pokok, sehingga jika harganya naik atau melampaui HET, maka akan langsung memengaruhi kondisi keuangan keluarga.

Tidak hanya menyampaikan keluhan mengenai harga yang tidak sesuai, Ibu Zahra juga menyampaikan harapan dan sarannya kepada pemerintah, khususnya terkait ketersediaan pasokan gas dan keberlanjutan distribusinya.

“Saya sangat berharap agar harga gas LPG 3 kilogram bisa diturunkan, atau paling tidak dijual sesuai dengan harga resmi dari pemerintah, supaya masyarakat kecil tidak semakin terbebani. Kami ini orang kecil, penghasilannya pas-pasan, jadi kalau harga kebutuhan pokok seperti gas naik atau tidak sesuai aturan, sangat terasa dampaknya. Selain itu, saya juga

berharap agar gas LPG ini tidak sering langka seperti beberapa waktu lalu. Kadang-kadang kami susah mencarinya, harus ke beberapa tempat dulu baru bisa dapat. Kalau bisa, pemerintah lebih memperhatikan distribusinya dan menambah pasokan gas LPG di pangkalan-pangkalan, supaya masyarakat lebih mudah mendapatkannya tanpa harus antri atau mencari ke tempat lain.” (Ibu Zahra, Komuniasi Pribadi, 2025)

Dari wawancara ini memperlihatkan dua harapan utama dari masyarakat terkait kebijakan LPG 3 kg, yaitu keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan. Ibu Zahra berharap harga LPG 3 kg dapat ditekan sesuai dengan HET yang berlaku agar subsidi benar-benar dirasakan. Di sisi lain, Ibu Zahra juga menyoroti masalah kelangkaan yang kerap terjadi, yang menimbulkan ketidakpastian dan keresahan di kalangan konsumen. Ibu Zahra mengusulkan agar pemerintah meningkatkan pengawasan serta memastikan distribusi yang adil dan lancar, termasuk dengan menambah jumlah pasokan di tingkat pangkalan. Hal ini menjadi penting agar masyarakat, khususnya kalangan kurang mampu, tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh LPG yang merupakan kebutuhan pokok.

2. Masyarakat yang pembeli di pangkalan Fera

Nama : Akbar

Alamat : Tatah Bangkal

Umur : 18

Pekerjaan : Siswa

Dari wawancara dengan Bapak Akbar, salah satu konsumen tetap di Pangkalan Fera. Bapak Akbar merupakan warga yang secara rutin menggunakan gas LPG 3 kg untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Akbar:

“Saya menggunakan gas LPG 3 kg untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, terutama untuk memasak. Setiap kali kehabisan, saya biasanya membeli gas tersebut di Pangkalan Fera, dan harganya sekarang sekitar Rp23.000 per tabung. Harga ini sudah saya bayarkan sejak beberapa waktu terakhir, dan bagi saya, itu sudah menjadi hal yang biasa karena memang di tempat lain, seperti pengecer, harganya bisa lebih tinggi lagi.” (Bapak Akbar, Komuniasi Pribadi, 2025)

Dari wawancara ini menunjukkan bahwa Bapak Akbar adalah pengguna aktif gas LPG 3 kg dan telah terbiasa membeli dengan harga Rp23.000 per tabung. Bapak Akbar mendapatkan gas langsung dari pangkalan, bukan dari pengecer. Hal ini mencerminkan kondisi di mana konsumen telah menerima harga jual tersebut sebagai harga pasar yang umum, meskipun sebenarnya harga tersebut lebih tinggi dari HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan pemerintah.

Setelah ditanya mengenai pengetahuannya terhadap harga resmi gas LPG 3 kg, Bapak Akbar mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai ketentuan pemerintah terkait HET. Bapak akbar mengatakan:

“Sejujurnya, saya tidak tahu sebelumnya berapa harga resmi dari pemerintah untuk gas LPG 3 kg ini. Saya hanya tahu harga yang berlaku di pangkalan tempat saya membeli. Tapi setelah diberi tahu bahwa harga yang ditetapkan pemerintah sebenarnya adalah Rp18.500, saya agak terkejut juga. Meski begitu, saya tetap merasa tidak masalah membayar Rp23.000, karena kalau dibandingkan dengan harga di pengecer yang bisa mencapai Rp25.000 atau lebih, harga di pangkalan ini masih termasuk wajar. Jadi, meskipun lebih mahal dari harga resmi, saya masih bisa menerima karena aksesnya lebih mudah dan harganya masih dalam batas kemampuan saya.” (Bapak Akbar, Komuniasi Pribadi, 2025)

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa konsumen seperti Bapak Akbar belum sepenuhnya mengetahui informasi tentang harga resmi gas LPG 3 kg. Ketidaktahuan ini membuat konsumen menerima harga yang berlaku di pasaran tanpa banyak pertanyaan. Bahkan setelah mengetahui adanya selisih dengan harga resmi, Bapak Akbar tetap tidak mempermasalahkannya karena menurutnya harga

tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan harga di tingkat pengecer. mengenai HET belum tersosialisasi secara optimal kepada masyarakat, dan hal ini menyebabkan toleransi terhadap harga yang melebihi ketentuan resmi, selama masih dianggap masuk akal.

Lebih lanjut, Bapak Akbar juga menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya ketersediaan gas LPG 3 kg dalam kehidupan sehari-hari, terlepas dari persoalan harga. Bapak akbar mengatakan:

“Menurut saya, yang paling penting itu jangan sampai gas LPG 3 kg langka di pasaran. Saya lebih khawatir kalau gasnya tidak ada, daripada soal harga. Kalau harus bayar Rp23.000 atau bahkan lebih, saya masih bisa terima, asalkan barangnya ada dan tidak sulit dicari. Karena kalau gas langka, masyarakat pasti akan sangat kesulitan. Mau masak jadi repot, apalagi bagi yang tidak punya kompor alternatif. Jadi, saya berharap pemerintah atau siapa pun yang bertanggung jawab bisa memastikan distribusi gas berjalan lancar dan tidak terjadi kekosongan, terutama di momen-momen penting seperti bulan puasa atau menjelang hari besar.” (Bapak Akbar, Komuniasi Pribadi, 2025)

Dari wawancara ini menunjukkan bahwa Bapak Akbar, ketersediaan gas menjadi prioritas utama dibandingkan dengan harga. Kekhawatiran terhadap kelangkaan dianggap lebih berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini mencerminkan persepsi bahwa stabilitas pasokan gas merupakan faktor krusial dalam menjaga kenyamanan dan kelancaran aktivitas rumah tangga. selama gas tersedia secara konsisten, masyarakat cenderung lebih fleksibel terhadap fluktuasi harga, bahkan jika harga tersebut melebihi ketentuan resmi.

3. Masyarakat yang pembeli di pangkalan Fera

Nama : Zainab

Alamat : Tatah Bangkal

Umur : 47

Pekerjaan : Petani

Wawancara dengan Ibu zainab, salah satu konsumen tetap di Pangkalan Fera. Ibu zainab merupakan warga yang secara rutin menggunakan gas LPG 3 kg untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Berikut adalah hasil wawancara dengan Ibu zainab:

“Saya menggunakan gas LPG 3 kg untuk kebutuhan memasak sehari-hari di rumah. Biasanya saya membeli gas di pangkalan Fera dengan harga Rp23.000 per tabung. Memang harganya lebih mahal dibandingkan harga yang saya ketahui di pasar, tapi pangkalan ini sangat dekat dengan rumah saya, jadi saya merasa lebih praktis dan tidak perlu pergi jauh-jauh untuk membelinya. Kalau harus pergi ke tempat yang lebih murah tapi jauh, saya rasa itu akan merepotkan terutama jika saya membutuhkan gas dalam keadaan mendesak.” (Ibu Zainab, Komuniasi Pribadi, 2025)

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa bagi Ibu Zainab, faktor jarak dan kemudahan akses lebih diutamakan daripada harga yang lebih murah. Ibu Zainab bersedia membayar harga lebih tinggi asalkan proses pembelian gas menjadi lebih mudah dan cepat tanpa perlu mengorbankan waktu dan tenaga. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen seperti Ibu Zainab mengutamakan kenyamanan dan kepraktisan dalam pengambilan keputusan pembelian gas LPG.

Namun, Ibu Zainab mengakui bahwa selama ini ia tidak mengetahui secara pasti harga resmi yang ditetapkan pemerintah untuk LPG 3 kg.

“Saya sebenarnya tidak tahu berapa harga resmi LPG 3 kg yang ditetapkan pemerintah. Selama ini saya hanya membeli dengan harga yang biasa dijual di pangkalan dekat rumah. Baru setelah diberi tahu bahwa harga resmi itu Rp18.500, saya merasa lebih paham. Meskipun harganya jauh lebih murah, saya tidak merasa keberatan selama harga yang saya bayar sekarang bisa menjamin ketersediaan gas kapan saja saya butuhkan.” (Ibu Zainab, Komuniasi Pribadi, 2025)

Ibu Zainab sebelumnya tidak memiliki informasi yang jelas mengenai harga standar LPG yang berlaku, namun setelah mendapat penjelasan, Ibu Zainab mampu

memahami perbedaan harga tersebut. Ibu Zainab juga menunjukkan sikap yang realistis dan tidak keberatan dengan harga yang sedikit lebih tinggi karena hal tersebut terkait dengan jaminan ketersediaan produk. Ini mencerminkan bahwa kesadaran konsumen terhadap harga resmi dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap harga jual di lapangan, tapi faktor lain seperti ketersediaan barang tetap menjadi prioritas utama.

Lebih jauh lagi, Ibu Zainab menegaskan bahwa ketersediaan dan kemudahan mendapatkan gas LPG menjadi faktor utama dalam memilih tempat pembelian, bahkan jika harus membayar lebih mahal.

“Menurut saya, yang paling penting adalah kemudahan dalam mendapatkan gas LPG. Kalau sampai gas itu langka, susah ditemukan, atau harus pergi jauh ke tempat lain, itu akan menyulitkan saya sehari-hari. Di beberapa tempat lain, kadang stok gas memang tidak selalu tersedia sehingga saya khawatir jika tidak beli di sini saya jadi kesulitan. Oleh karena itu, saya rela membayar sedikit lebih mahal asal bisa dapat gas kapan saja saya butuhkan dan tidak perlu khawatir kehabisan.” (Ibu Zainab, Komuniiasi Pribadi, 2025)

Ibu Zainab menunjukkan bahwa stabilitas pasokan dan kemudahan akses merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keputusan pembelian gas LPG. Meskipun harga sedikit lebih tinggi, Ibu Zainab menilai bahwa ketersediaan gas secara konsisten sangat penting untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya tanpa hambatan. Hal ini menandakan bahwa konsumen cenderung memilih tempat yang dapat memberikan kepastian stok dan kemudahan layanan dibandingkan sekadar harga murah.

Berikut hasil wawancara dengan 3 masyarakat sekitar di pangkalan Nazma humairo

1. Masyarakat yang pembeli di pangkalan Nazma humairo

Nama : Fatimah

Alamat : Bangkal Tengah

Umur : 43

Pekerjaan : Petani

Ibu Fatimah konsumen gas LPG 3 kg di pangkalan Nazma Humairo, saya melakukan wawancara dengan Ibu Fatimah, seorang konsumen tetap yang menggunakan gas LPG untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Berikut adalah pernyataan Ibu Fatimah:

“Saya menggunakan gas LPG 3 kg untuk kebutuhan memasak sehari-hari di rumah. Biasanya, saya membeli tabung gas tersebut di pangkalan Nazma Humairo dengan harga sekitar Rp22.000 per tabung. Harga ini memang lebih tinggi dibandingkan harga resmi yang ditetapkan oleh Pertamina, yaitu Rp18.500. Namun, saya merasa harga tersebut masih cukup masuk akal dan terjangkau sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga saya. Selain itu, saya memilih LPG ukuran 3 kg karena ukurannya yang kecil dan praktis, serta sesuai dengan kebutuhan harian tanpa harus membeli tabung berukuran besar.” (Ibu Fatimah, Komuniasi Pribadi, 2025)

Ibu Fatimah menggunakan LPG 3 kg secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan memasak di rumahnya. Meskipun harga yang dibayarkan di pangkalan lebih tinggi dari harga resmi, hal ini tidak menjadi hambatan karena Ibu Fatimah menganggap harga tersebut masih sesuai dengan daya beli keluarga dan kebutuhan praktisnya.

Meskipun menyadari perbedaan harga antara harga resmi dan harga di pangkalan, Ibu Fatimah tetap memilih untuk membeli di pangkalan dengan alasan harga yang masih masuk akal serta kemudahan akses. Ibu Fatimah mengatakan:

“Saya sudah mengetahui bahwa harga resmi gas LPG 3 kg dari Pertamina adalah Rp18.500 per tabung. Akan tetapi, saya tidak merasa keberatan

membayar lebih mahal, sekitar Rp22.000, karena saya memahami bahwa harga tersebut sudah termasuk biaya distribusi dan faktor lain yang memengaruhi harga di pangkalan. Selama harga masih dalam batas yang wajar dan saya bisa mendapatkan gas tersebut kapan saja saya butuhkan, saya merasa hal itu tidak menjadi masalah.” (Ibu Fatimah, Komuniasi Pribadi, 2025)

Ibu Fatimah memiliki pemahaman yang baik mengenai harga resmi LPG 3 kg, namun lebih menitikberatkan pada kemudahan akses dan ketersediaan produk. Ibu Fatimah menilai kenaikan harga di pangkalan adalah hal yang wajar dan tidak mengurangi niatnya untuk membeli di tempat tersebut.

Selain harga, faktor jarak dan kemudahan lokasi pangkalan menjadi pertimbangan penting bagi Ibu Fatimah dalam memilih tempat membeli gas LPG.

Ibu Fatimah mengatakan:

“Saya lebih memilih membeli gas LPG 3 kg di pangkalan Nazma Humairo karena lokasinya sangat dekat dengan rumah saya. Saya tidak perlu mengeluarkan banyak waktu dan tenaga untuk mendapatkannya. Kemudahan ini sangat membantu saya dalam mengatur kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Harapan saya, jangan sampai terjadi kelangkaan gas LPG di pangkalan ini karena jika gas langka, saya akan kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama memasak untuk keluarga.” (Ibu Fatimah, Komuniasi Pribadi, 2025)

Kemudahan akses pangkalan yang berlokasi sangat dekat dengan tempat tinggal Ibu Fatimah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pilihannya dalam membeli gas LPG 3 kg. Lokasi yang strategis memungkinkan Ibu Fatimah menghemat waktu dan tenaga, sehingga memudahkan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari tanpa harus menempuh jarak jauh atau mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi. Selain itu, stabilitas ketersediaan gas LPG di pangkalan tersebut sangat krusial bagi Ibu Fatimah, mengingat gas LPG adalah kebutuhan pokok yang mendukung aktivitas memasak dan kehidupan keluarga

secara umum. Kekhawatiran akan terjadinya kelangkaan gas menunjukkan bahwa ketersediaan produk yang konsisten dan terpercaya sangat penting untuk menjaga kelancaran rutinitas rumah tangga. Dengan demikian, pangkalan yang dekat dan dapat diandalkan tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga sumber rasa aman dan kenyamanan bagi konsumen seperti Ibu Fatimah dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

2. Masyarakat yang pembeli di pangkalan Nazma humairo

Nama : Rafiqah

Alamat : Bangkal Tengah

Umur : 41

Pekerjaan : Guru

Ibu Rafiqah, seorang konsumen setia gas LPG 3 kg yang berlangganan di pangkalan Nazma Humairo, beliau berbagi pengalaman pribadi dan pandangannya mengenai harga, akses, dan ketersediaan gas LPG. Berikut adalah hasil wawancara dengan Ibu Rafiqah:

“Saya menggunakan gas LPG 3 kg sebagai kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan biasanya membeli dengan harga Rp22.000 per tabung. Sebenarnya, saya tidak terlalu paham berapa harga resmi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk LPG 3 kg ini. Namun, saya merasa tidak masalah membayar harga tersebut karena pemilik pangkalan adalah saudara saya. Karena ada hubungan keluarga, saya mendapatkan perlakuan khusus misalnya, saat gas tersedia, saya selalu diprioritaskan untuk mendapatkan satu tabung. Jadi, saya merasa nyaman dan tidak keberatan membayar harga sedikit lebih tinggi asalkan pasokan gas selalu tersedia bagi saya.” (Ibu Rafiqah, Komuniasi Pribadi, 2025)

Dari pernyataan ini, terlihat bahwa Ibu Rafiqah tidak memiliki informasi lengkap mengenai harga resmi LPG 3 kg yang berlaku, tetapi menerima harga yang sedikit lebih tinggi karena adanya hubungan kekeluargaan dengan pemilik

pangkalan. Faktor sosial berupa hubungan keluarga ini memberikan rasa aman dan kenyamanan dalam mendapatkan pasokan gas. Hal ini menunjukkan bahwa aspek non-ekonomi seperti kepercayaan dan kedekatan personal dapat memengaruhi tingkat kepuasan konsumen terhadap harga dan ketersediaan LPG.

Selain alasan harga dan kemudahan mendapatkan tabung gas, Ibu Rafiqah juga menekankan pentingnya stabilitas pasokan dalam memilih untuk membeli langsung dari pangkalan.

“Karena saya tahu pangkalan tempat saya berlangganan akan selalu mengutamakan saya, saya tidak perlu khawatir akan kehabisan gas. Setiap kali gas tersedia, satu tabung pasti disisihkan untuk saya, sehingga saya bisa memastikan kebutuhan dapur saya terpenuhi tanpa gangguan. Saya juga lebih memilih membeli langsung di pangkalan daripada membeli gas dari pengecer yang sering menjual dengan harga jauh lebih mahal. Dengan membeli langsung dari pangkalan, saya merasa lebih aman dan harga yang saya bayar masih bisa saya terima, meskipun terkadang sedikit di atas harga resmi. Hal ini membuat saya lebih tenang dan tidak perlu repot mencari-cari gas di tempat lain yang belum tentu ada.” (Ibu Rafiqah, Komunikasi Pribadi, 2025)

Hasil dari wawancara ini mengatakan bahwa prioritas pasokan di pangkalan dan jaminan ketersediaan gas menjadi faktor utama yang membuat Ibu Rafiqah merasa tenang dan nyaman. Ibu Rafiqah secara sadar memilih jalur pembelian yang lebih stabil meski dengan harga yang sedikit lebih tinggi, demi menghindari risiko kelangkaan dan harga mahal dari pengecer. Hal ini menegaskan bahwa stabilitas distribusi dan kejelasan harga menjadi dua aspek penting bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan LPG.

Namun, meskipun Ibu Rafiqah merasa cukup puas dengan ketersediaan gas di pangkalan tempatnya berlangganan, Ibu Rafiqah menyampaikan harapan agar

pihak distributor dapat meningkatkan pasokan LPG demi kepentingan masyarakat luas.

“Saya berharap agar pihak distributor dapat menambah jumlah pasokan gas LPG ke setiap pangkalan secara lebih konsisten. Dengan peningkatan pasokan ini, diharapkan kelangkaan yang kerap terjadi di pangkalan-pangkalan lain bisa diminimalkan. Jika pasokan gas mencukupi dan teratur, masyarakat tidak perlu lagi bingung dan panik mencari gas di tempat lain, yang sering kali berujung pada pembelian dengan harga yang jauh lebih mahal di pengecer. Saya yakin, apabila distribusi gas LPG lebih lancar dan merata, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dengan baik tanpa menimbulkan keresahan.” (Ibu Rafiqah, Komuniasi Pribadi, 2025)

Dalam pernyataan ini, Ibu Rafiqah menekankan pentingnya peran distributor dalam menjaga kestabilan dan ketersediaan pasokan LPG di pangkalan. Ibu Rafiqah mengidentifikasi kelangkaan sebagai salah satu masalah utama yang masih sering dihadapi masyarakat. Usulan untuk peningkatan pasokan gas LPG mencerminkan kebutuhan akan distribusi yang lebih efektif dan merata agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara optimal, sekaligus mencegah ketidakpastian dan kenaikan harga yang merugikan masyarakat luas.

3. Masyarakat yang pembeli di pangkalan Nazma humairo

Nama : Darmi

Alamat : Bangkal Tengah

Umur : 46

Pekerjaan : Petani

Bapak Darmi, seorang konsumen gas LPG 3 kg di pangkalan Nazma Humairo, beliau menjelaskan secara rinci pengalaman serta pandangannya tentang penggunaan gas LPG dan berbagai tantangan yang dihadapi dalam memperoleh kebutuhan tersebut. Bapak darmi mengatakan:

“Saya sudah lama menggunakan gas LPG 3 kg untuk kebutuhan memasak sehari-hari di rumah. Biasanya saya membeli gas ini di pangkalan dengan harga sekitar Rp22.000. Saya sendiri sebenarnya tidak begitu paham dengan harga resmi yang ditetapkan pemerintah, karena saya lebih fokus pada kebutuhan praktis sehari-hari. Bagaimanapun juga, saya merasa gas LPG ini sangat membantu dan memudahkan kehidupan saya dan keluarga, terutama dalam hal memasak. Jadi, meskipun harga gas kadang naik sedikit, saya tetap rela membeli karena kalau tidak ada gas ini, saya harus mencari alternatif lain yang lebih merepotkan dan memakan waktu.” (Bapak darmi, Komuniasi Pribadi, 2025)

Dari wawancara ini menegaskan bahwa gas LPG 3 kg telah menjadi kebutuhan utama dan sangat vital dalam aktivitas rumah tangga Bapak Darmi. Meskipun tidak mengetahui secara detail harga resmi, kesadaran akan pentingnya kemudahan dan manfaat gas LPG membuat Bapak Darmi tetap membeli dengan harga berapapun. Hal ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada gas LPG serta kurangnya informasi tentang regulasi harga di kalangan konsumen.

Meski demikian, di tengah ketergantungan yang kuat terhadap gas LPG, Bapak Darmi mengakui adanya kendala yang cukup sering di temui, terutama berkaitan dengan ketersediaan stok di pangkalan.

“Saya biasanya membeli gas langsung di pangkalan Nazma Humairo yang letaknya dekat dengan rumah saya. Namun, terkadang saya harus membeli gas di pengecer lain, terutama saat pangkalan kehabisan stok. Saat seperti itu, saya harus membayar lebih karena harga gas di pengecer biasanya lebih mahal dibandingkan harga di pangkalan. Ini cukup memberatkan, terutama jika sering terjadi. Tapi saya tidak punya pilihan lain karena kebutuhan memasak tetap harus terpenuhi.” (Bapak darmi, Komuniasi Pribadi, 2025)

Dari wawancara ini dapat dipahami bahwa ketidakstabilan pasokan gas LPG di pangkalan mengakibatkan konsumen harus beralih ke pengecer yang menawarkan harga lebih tinggi. Hal ini memberikan tekanan finansial tambahan pada konsumen dan menggambarkan adanya gangguan dalam distribusi gas LPG dari pangkalan ke konsumen akhir.

Selanjutnya, permasalahan stok ini tidak hanya berimbas pada harga, tetapi juga menimbulkan kesulitan nyata dalam memperoleh gas LPG secara fisik di lapangan.

“Ada waktu di mana saya benar-benar kesulitan mendapatkan gas LPG. Saya sampai harus berkeliling desa untuk mencari gas di pangkalan-pangkalan yang lain, namun sayangnya tetap tidak ada yang tersedia. Situasi itu sangat menyulitkan saya dan keluarga, karena memasak adalah kebutuhan harian yang tidak bisa ditunda. Saya berharap kelangkaan seperti ini tidak terus terjadi di masa depan. Kalau sampai kelangkaan ini berlangsung lama, saya takut harus kembali menggunakan kayu bakar untuk memasak, dan itu tentu sangat merepotkan karena harus mencari kayu, menghidupkan api, dan mengawasinya. Semoga pemerintah atau pihak terkait bisa mengatasi masalah ini agar masyarakat tidak kesulitan lagi.” (Bapak darmi, Komuniiasi Pribadi, 2025)

Pengalaman ini mengungkapkan dampak serius dari kelangkaan gas LPG yang dirasakan langsung oleh konsumen. Kesulitan memperoleh gas tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan, tetapi juga mengancam kelancaran aktivitas rumah tangga. Kebutuhan untuk kembali menggunakan kayu bakar yang kurang efisien menandakan potensi kemunduran dalam kesejahteraan konsumen bila masalah distribusi tidak segera diatasi.

Berikut hasil wawancara dengan 3 masyarakat sekitar di pangkalan Zainal Hakim:

1. Masyarakat yang pembeli di pangkalan Zainal Hakim

Nama : Jamaludin

Alamat : Pandan Sari

Umur : 29

Pekerjaan : Petani

Bapak Jamal, seorang petani sekaligus konsumen gas LPG 3 kg, membagikan pengalamannya mengenai harga dan ketersediaan gas LPG yang selama ini Bapak Jamal alami. Berikut adalah perkataan Bapak Jamal:

"Saya sudah lama menggunakan gas LPG 3 kg sebagai bahan bakar utama di rumah saya. Biasanya, saya membeli tabung gas tersebut di pangkalan Zainal Hakim dengan harga sekitar Rp21.000 per tabung. Sebelumnya, saya tidak tahu bahwa pemerintah sebenarnya sudah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk LPG 3 kg, yaitu sebesar Rp18.500. Karena ketidaktahuan ini, saya merasa selama ini membayar lebih mahal tanpa sadar. Harga yang saya bayarkan itu tentunya sedikit lebih tinggi dari yang seharusnya, tetapi saya tetap membelinya karena memang tidak ada pilihan lain yang lebih murah di lingkungan saya." (Bapak Jamal, Komuniasi Pribadi, 2025)

Dari wawancara ini, terlihat bahwa Bapak Jamal belum mendapatkan informasi yang memadai terkait regulasi harga LPG 3 kg, sehingga Bapak Jamal membeli dengan harga di atas HET yang berlaku. Ketidaktahuan ini membuatnya harus membayar lebih mahal tanpa adanya alternatif harga yang lebih terjangkau di lingkungan tempat tinggalnya.

Setelah mengetahui adanya batas harga resmi tersebut, Bapak Jamal merasa keberatan dan khawatir karena perbedaan harga tersebut cukup signifikan bagi kondisi keluarganya yang sederhana.

"Ketika saya mengetahui bahwa harga resmi LPG 3 kg yang ditetapkan pemerintah sebenarnya hanya Rp18.500, saya merasa sangat keberatan. Saya dan keluarga memang tergolong kurang mampu, dan sebagai kepala keluarga yang bekerja sebagai petani, saya harus memikirkan setiap pengeluaran dengan sangat hati-hati. Selisih harga yang saya bayar, walaupun mungkin hanya sekitar Rp2.500 sampai Rp3.000 per tabung, tetapi itu sudah cukup membebani pengeluaran keluarga kami yang terbatas. Bahkan selisih seribu rupiah saja bagi kami sangat berarti karena kami harus mengatur pengeluaran dengan sangat ketat untuk kebutuhan pokok sehari-hari." (Bapak Jamal, Komuniasi Pribadi, 2025)

Dari wawancara ini menunjukkan bahwa kenaikan harga di atas HET sangat membebani konsumen berpenghasilan rendah seperti Bapak Jamal. Dalam kondisi ekonomi yang sederhana, selisih harga yang kecil sekalipun dapat berdampak signifikan terhadap keuangan keluarga, apalagi jika LPG merupakan kebutuhan rutin yang harus dipenuhi setiap bulan.

Selain masalah harga yang memberatkan, Bapak Jamal juga menghadapi kendala dalam hal ketersediaan stok gas LPG di pangkalan, yang kadang memaksanya membeli dengan harga yang jauh lebih mahal di pengecer.

"Saya biasanya membeli gas LPG 3 kg di pangkalan Zainal Hakim, yang menjadi tempat langganan saya. Namun, seringkali saya harus menghadapi situasi di mana stok gas di pangkalan tersebut sedang habis atau terbatas. Akibatnya, saya terpaksa membeli tabung gas di pengecer lain yang harganya jauh lebih tinggi, bahkan bisa mencapai Rp25.000 sampai Rp27.000 per tabung. Harga yang jauh di atas HET ini jelas sangat memberatkan kami sebagai konsumen kecil. Oleh karena itu, saya sangat berharap pihak pangkalan dapat memperbaiki manajemen stok agar ketersediaan gas LPG 3 kg menjadi lebih stabil dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Selain itu, saya juga berharap harga gas LPG 3 kg dapat diturunkan atau paling tidak disesuaikan dengan HET yang berlaku, supaya kami masyarakat kecil bisa mendapatkan akses yang adil dan terjangkau terhadap kebutuhan pokok ini." (Bapak Jamal, Komuniasi Pribadi, 2025)

Kelangkaan stok LPG di pangkalan membuat konsumen seperti Bapak Jamal harus membeli dengan harga jauh lebih mahal dari harga resmi, yang semakin menambah beban finansial. Hal ini menegaskan pentingnya pengelolaan distribusi dan stok LPG yang lebih baik, agar harga dapat terjaga dan pasokan selalu tersedia, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

2. Masyarakat yang pembeli di pangkalan Zainal Hakim

Nama : Juhriansyah

Alamat : Pandan Sari

Umur : 39

Pekerjaan : Petani

Sebagai konsumen gas LPG 3 kg yang rutin membeli di pangkalan Zainal Hakim, Bapak Juhri memberikan pandangan mengenai kebiasaannya dalam menggunakan dan memperoleh gas LPG, termasuk bagaimana Bapak Juhri menyikapi perbedaan harga yang ada di lapangan. Bapak Juhri mengatakan:

“Saya menggunakan gas LPG 3 kg untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak. Hampir setiap hari, saya dan keluarga menggunakan gas ini untuk keperluan dapur, jadi keberadaannya sangat penting bagi saya. Saya biasa membeli gas ini di pangkalan Zainal Hakim dengan harga sekitar Rp21.000 per tabung. Saya tahu bahwa harga resmi dari pemerintah lebih rendah dari itu, mungkin di kisaran Rp18.500. Tapi saya tetap membeli di pangkalan meskipun harganya sedikit lebih tinggi, karena saya tidak punya banyak pilihan. Kebutuhan akan gas tidak bisa ditunda, jadi saya lebih memilih membeli langsung saat saya butuh, meskipun ada selisih harga. Menurut saya, selisih itu masih bisa ditoleransi selama barangnya tersedia dan tidak terlalu jauh dari harga yang wajar.” (Bapak Juhri, Komuniasi Pribadi, 2025)

Dari wawancara ini dapat dipahami bahwa gas LPG 3 kg merupakan kebutuhan pokok bagi Bapak Juhri dan keluarganya, terutama untuk aktivitas memasak. Bapak Juhri menyadari bahwa harga yang ia bayarkan di pangkalan sedikit lebih mahal dibanding HET, namun tetap dianggap wajar mengingat pentingnya gas tersebut dan urgensi pemakaiannya. Hal ini menunjukkan sikap pragmatis konsumen dalam menyikapi kondisi harga di lapangan, di mana aspek kebutuhan lebih diutamakan daripada kepatuhan mutlak terhadap harga acuan pemerintah.

Lebih lanjut, Bapak Juhri membandingkan pilihan pembelian di pangkalan dengan alternatif membeli dari pengecer. Bapak Juhri menjelaskan alasan di balik pandangannya terhadap pembelian langsung di pangkalan.

“Kalau dibandingkan dengan pengecer, harga di pangkalan itu jauh lebih murah. Di lingkungan tempat tinggal saya, pengecer bisa menjual gas LPG 3 kg dengan harga yang cukup tinggi, bahkan pernah sampai Rp32.000 per tabung. Itu hampir dua kali lipat dari harga resmi. Makanya saya selalu berusaha beli langsung di pangkalan, karena selain harganya lebih masuk akal, saya juga merasa lebih yakin dengan keasliannya. Kadang kalau beli di pengecer, kita tidak tahu apakah tabung itu masih bagus, atau apakah isinya penuh. Di pangkalan, saya merasa lebih aman dan lebih percaya, meskipun harus antri atau datang sendiri. Jadi meskipun harga pangkalan sedikit lebih mahal dari HET, tetap lebih baik dibandingkan beli dari pengecer yang harganya tidak menentu dan jauh lebih mahal.” (Bapak Juhri, Komuniasi Pribadi, 2025)

Dari wawancara ini menunjukkan bahwa bagi Bapak Juhri, aspek keterjangkauan dan kepercayaan menjadi faktor penting dalam memilih tempat membeli LPG. Bapak Juhri memandang bahwa membeli langsung di pangkalan meskipun sedikit lebih mahal dari HET tetap lebih menguntungkan dibandingkan dengan pengecer yang mematok harga tinggi dan tidak selalu menjamin kualitas serta keamanan produk. Hal ini mencerminkan pola pikir konsumen yang berorientasi pada efisiensi dan kepercayaan dalam pengambilan keputusan pembelian.

Di akhir wawancara, Bapak Juhri menyampaikan pandangannya mengenai stabilitas pasokan gas LPG serta harapannya ke depan terkait distribusi gas bersubsidi ini.

“Selama ini saya belum pernah mengalami kelangkaan gas LPG 3 kg. Setiap kali saya datang ke pangkalan Zainal Hakim, pasti tersedia. Memang kadang harus antri atau datang pagi-pagi, tapi sejauh ini tidak sampai kehabisan. Saya bersyukur dengan kondisi seperti ini, karena gas sangat penting untuk kebutuhan rumah tangga. Saya tidak bisa bayangkan kalau sampai langka,

pasti repot sekali. Saya berharap ke depan tidak terjadi perubahan besar dalam distribusinya, apalagi sampai ada kelangkaan atau pembatasan. Saya juga berharap harganya tidak naik terlalu jauh dari yang sekarang. Selama ini, dengan harga Rp21.000 di pangkalan, saya masih bisa menyesuaikan anggaran rumah tangga. Tapi kalau harganya terus naik, tentu akan memberatkan kami sebagai masyarakat kecil.” (Bapak Juhri, Komuniasi Pribadi, 2025)

Dari wawancara ini, terlihat bahwa Bapak Juhri memiliki pengalaman positif terkait ketersediaan gas LPG di wilayahnya. Bapak Juhri tidak mengalami kesulitan berarti dalam memperoleh gas dan merasa cukuppuas dengan kondisi distribusi saat ini. Namun, ada kekhawatiran terhadap kemungkinan kelangkaan atau kenaikan harga di masa mendatang. Harapan agar distribusi tetap lancar dan harga tetap terjangkau mencerminkan kebutuhan konsumen terhadap kepastian dan kestabilan dalam pengadaan energi rumah tangga yang vital.

3. Masyarakat yang pembeli di pangkalan Zainal hakim

Nama : Raudah

Alamat : Pandan Sari

Umur : 38

Pekerjaan : Petani

Ibu Raudah, seorang ibu rumah tangga yang merupakan pelanggan tetap di Pangkalan Zainal Hakim. Dalam wawancara, Ibu Raudah menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan jujur mengenai pengalamannya sebagai konsumen.

Ibu raudah mengatakan:

“Saya sudah menggunakan gas LPG 3 kg ini sejak lama untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Biasanya, saya membeli gas langsung ke pangkalan dengan harga sekitar Rp21.000 per tabung. Saya tahu bahwa sebenarnya pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi sebesar Rp18.500. Jadi memang ada selisih sekitar dua ribu lima ratus rupiah dari harga resmi. Tapi buat saya, harga segitu masih tergolong murah dan masih wajar. Saya tidak

merasa keberatan karena gas ini sangat membantu dan memang diperlukan setiap hari. Kalau dibandingkan dengan kebutuhan rumah tangga lainnya, harga gas ini menurut saya masih bisa dijangkau, apalagi kalau beli langsung ke pangkalan.” (Ibu Raudah, Komuniasi Pribadi, 2025)

Wawancara ini menunjukkan bahwa Ibu Raudah menyadari adanya selisih antara harga yang bayarkan dan harga resmi dari pemerintah. Namun, Ibu Raudah tidak menganggap hal tersebut sebagai masalah besar. Ibu Raudah menilai bahwa selama harga masih dalam batas kewajaran dan gas LPG tetap tersedia, maka selisih tersebut masih bisa diterima. Hal ini mencerminkan bahwa toleransi harga di kalangan konsumen cukup tinggi selama kebutuhan dasar tetap terpenuhi secara konsisten.

Setelah menjelaskan pandangannya tentang harga gas LPG 3 kg, Ibu Raudah juga menjelaskan alasan mengapa ibu raudah dapat menerima adanya selisih harga tersebut.

“Saya paham kok kenapa harganya bisa berbeda dari harga yang ditentukan pemerintah. Saya rasa pihak pangkalan juga pasti punya biaya tambahan, seperti biaya transportasi, biaya operasional harian, atau tenaga kerja untuk mengangkut dan mendistribusikan tabung gas. Jadi menurut saya, wajar saja kalau mereka menaikkan harga sedikit, asal tidak terlalu jauh dari harga resmi. Lagipula, kalau kita pikirkan, mereka juga butuh keuntungan supaya bisa terus jalan usahanya. Selama harga yang diberikan tidak berlebihan, saya masih bisa terima. Yang penting tidak dimanfaatkan untuk keuntungan yang terlalu besar di luar batas kewajaran.” (Ibu Raudah, Komuniasi Pribadi, 2025)

Dalam wawancara ini, terlihat bahwa Ibu Raudah memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap rantai distribusi dan realitas ekonomi yang dihadapi pangkalan. Ibu Raudah tidak hanya melihat dari sudut pandang konsumen, tetapi juga mempertimbangkan beban biaya dan kebutuhan usaha dari pihak penjual. Hal

ini menunjukkan adanya kesadaran kritis serta sikap yang rasional dalam memandang kebijakan harga di tingkat distribusi akhir.

Lebih lanjut, Ibu Raudah juga mengutarakan alasan mengapa lebih memilih membeli langsung ke pangkalan, serta harapannya terhadap pasokan gas LPG 3 kg yang stabil.

“Saya memang lebih senang beli langsung di pangkalan. Selain karena harganya lebih murah dibandingkan pengecer, saya merasa lebih yakin karena gasnya pasti tersedia dan tidak ada tipu-tipu. Kalau beli di pengecer, biasanya harganya bisa lebih mahal, bisa sampai Rp25.000 bahkan lebih, dan kadang-kadang stoknya juga kosong. Di pangkalan, saya merasa lebih tenang karena harganya jelas dan tabungunya selalu tersedia. Harapan saya, gas LPG 3 kg ini bisa terus tersedia di pangkalan tanpa kekurangan stok. Soalnya gas ini kan penting sekali, apalagi untuk ibu rumah tangga seperti saya. Kalau gas habis dan susah dicari, otomatis kegiatan di dapur bisa terganggu. Saya cuma berharap distribusinya lancar dan jangan sampai langka, karena gas itu kebutuhan pokok sekarang.” (Ibu Raudah, Komuniasi Pribadi, 2025)

Wawancara ini menunjukkan bahwa bagi Ibu Raudah, kestabilan harga dan ketersediaan pasokan menjadi hal yang sangat penting dalam keputusan pembelian. Ibu Raudah cenderung menghindari pengecer karena harga yang tidak menentu dan pasokan yang tidak selalu tersedia. Harapan besar Ibu Raudah ditujukan pada pemerintah dan pihak distribusi agar dapat menjamin kelancaran suplai gas LPG 3 kg di tingkat pangkalan. Hal ini menegaskan bahwa kepercayaan dan aksesibilitas menjadi faktor utama dalam pemenuhan kebutuhan energi rumah tangga.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Raudah, dapat disimpulkan bahwa konsumen gas LPG 3 kg memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap struktur harga dan dinamika distribusi. Meski menyadari adanya perbedaan antara harga resmi dan harga di lapangan, konsumen tidak serta-merta mempermasalahkannya selama harga masih terjangkau dan pasokan tersedia. Selain itu, kepercayaan

terhadap pangkalan resmi serta harapan atas ketersediaan barang menunjukkan bahwa konsumen menaruh perhatian besar terhadap keberlanjutan suplai dan keteraturan sistem distribusi. Wawancara ini menunjukkan bahwa keberpihakan terhadap konsumen tidak hanya ditentukan oleh kebijakan harga, tetapi juga oleh kejelasan informasi, akses yang merata, dan transparansi dalam distribusi.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan yang memenuhi kriteria, observasi awal di lapangan ketika riset, dan dokumen -dokumen pendukung data penelitian. Peneliti menyajikan analisis data sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut.

1. Penetapan Harga Jual Gas LPG 3kg Di Pangkalan Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik pangkalan gas LPG 3 kg dan beberapa masyarakat pengguna, dapat disimpulkan bahwa penetapan harga jual gas LPG 3 kg di beberapa pangkalan di Kecamatan Tatah Makmur dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting. Faktor-faktor ini berkaitan erat dengan kondisi lapangan, strategi usaha, serta respon masyarakat terhadap harga dan ketersediaan barang. Berikut ini adalah analisis dari masing-masing faktor:

1) Mewujudkan Keuntungan Perusahaan

Salah satu faktor utama yang menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan harga jual gas LPG 3 kilogram di tingkat pangkalan adalah dorongan dari pemilik usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak. Tujuan ini sejalan dengan prinsip

dasar kegiatan usaha pada umumnya, yakni untuk mendapatkan imbal hasil yang sepadan dengan modal, waktu, tenaga, dan risiko yang telah dikeluarkan selama proses operasional berlangsung. Dalam konteks ini, keuntungan bukan hanya dianggap sebagai hasil akhir, tetapi juga sebagai elemen penting yang memastikan keberlangsungan dan stabilitas usaha dalam jangka panjang. (Kotler, Philip and Keller, 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemilik pangkalan, seperti Ibu Fera, Ibu Nazma Humairo, dan Bapak Zainal Hakim, diketahui bahwa mereka sepakat untuk menetapkan harga jual gas LPG di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan oleh pemerintah. Keputusan tersebut bukan diambil tanpa alasan, melainkan merupakan respons terhadap berbagai realitas dan tantangan di lapangan, terutama yang berkaitan dengan beban biaya operasional tambahan yang tidak tertutupi oleh mekanisme subsidi yang berlaku.

Sebagai contoh, Ibu Fera menjelaskan bahwa biaya transportasi menggunakan kelotok yaitu perahu kecil bermesin yang digunakan untuk mengangkut barang dari titik distribusi utama ke lokasi pangkalan di daerah terpencil dapat mencapai angka Rp200.000 untuk sekali perjalanan. Jumlah tersebut tergolong signifikan dan secara langsung memengaruhi total biaya distribusi gas LPG ke konsumen akhir. Selain itu, masih ada biaya tambahan lain seperti upah tenaga angkut, biaya bongkar muat, serta pengeluaran tak terduga yang kerap muncul dalam proses pendistribusian.

Dengan mempertimbangkan semua komponen biaya tersebut, penetapan harga jual gas LPG 3 kg sebesar Rp23.000 per tabung dianggap sebagai langkah

yang realistis dan rasional. Langkah ini diambil bukan semata-mata untuk meraup keuntungan lebih, melainkan untuk menjaga keberlangsungan operasional usaha, memastikan kualitas layanan kepada konsumen tetap terjaga, serta memberikan kompensasi yang wajar terhadap semua beban kerja dan biaya yang dikeluarkan. Maka dari itu, kebijakan penyesuaian harga ini dipandang sebagai upaya yang wajar demi tercapainya keseimbangan antara keberlanjutan usaha dan kepuasan pelanggan.

2) Volume Penjualan

Faktor volume penjualan memainkan peranan penting dalam proses pengambilan keputusan terkait penetapan harga, khususnya dalam konteks perdagangan barang kebutuhan pokok seperti gas LPG. Meskipun harga jual gas oleh para pelaku usaha berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetap terdapat pertimbangan yang cermat terhadap kondisi daya beli masyarakat. Para pelaku usaha menyadari bahwa kenaikan harga yang terlalu tinggi dapat berdampak langsung terhadap tingkat permintaan konsumen. Jika harga dianggap tidak wajar atau melampaui batas toleransi yang dapat diterima masyarakat, maka bukan tidak mungkin permintaan akan menurun secara drastis, yang pada akhirnya dapat merugikan usaha itu sendiri. (Mankiw, 2017)

Oleh karena itu, penetapan harga tidak semata-mata didasarkan pada keinginan untuk memperoleh margin keuntungan yang tinggi, melainkan juga mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan usaha dan kemampuan konsumen dalam membeli produk. Dalam praktiknya, hal ini terlihat dari strategi

penetapan harga yang diterapkan oleh Pangkalan Zainal Hakim, yang memutuskan untuk menjual gas LPG dengan harga Rp21.000 per tabung. Harga ini lebih rendah jika dibandingkan dengan harga jual yang ditetapkan oleh pangkalan-pangkalan lain di wilayah sekitarnya. Keputusan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan merupakan hasil dari analisis terhadap dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat setempat.

Harga Rp21.000 dianggap masih berada dalam batas kemampuan masyarakat untuk membeli, sehingga tidak menimbulkan penurunan permintaan yang signifikan. Dengan tetap menjaga harga dalam kisaran yang terjangkau, pangkalan ini berharap dapat mempertahankan volume penjualan yang tinggi. Strategi tersebut memungkinkan pelaku usaha untuk menutupi berbagai jenis biaya, baik biaya tetap seperti sewa tempat, gaji pegawai, dan perizinan, maupun biaya variabel seperti ongkos pengangkutan dan biaya operasional harian lainnya. Dalam jangka panjang, keberlangsungan usaha akan lebih terjamin jika volume penjualan dapat dipertahankan, meskipun margin keuntungan per unit produk yang dijual relatif kecil.

Pendekatan ini menunjukkan pemahaman yang matang dari pelaku usaha terhadap prinsip dasar ekonomi, yaitu bahwa total keuntungan tidak hanya ditentukan oleh besarnya keuntungan per unit, tetapi juga sangat bergantung pada jumlah unit yang terjual. Dengan kata lain, meskipun keuntungan dari setiap tabung gas mungkin tidak besar, namun apabila jumlah penjualan mencapai volume yang tinggi, maka akumulasi keuntungan yang diperoleh tetap akan signifikan dan cukup untuk mendukung kelangsungan operasional usaha. Strategi ini mencerminkan

upaya untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis, kepuasan konsumen, dan stabilitas harga di tingkat masyarakat.

3) Persaingan dari Perusahaan Lain

Dalam konteks distribusi gas LPG 3 kg di Kecamatan Tatah Makmur, dinamika persaingan tidak hanya terjadi antar sesama pangkalan resmi, tetapi juga melibatkan para pengecer yang sering kali menjual LPG dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini menciptakan tantangan tersendiri bagi para pemilik pangkalan, karena meskipun mereka terikat oleh regulasi harga, di lapangan mereka harus tetap bersaing dengan pengecer yang memanfaatkan kelangkaan atau tingginya permintaan untuk menjual gas dengan harga yang lebih mahal.

Salah satu pemilik pangkalan di wilayah tersebut, Zainal Hakim, mengungkapkan bahwa pihaknya memang menjual LPG 3 kg dengan harga Rp21.000 per tabung, yang secara teknis melebihi ketentuan HET. Namun, ia menegaskan bahwa harga tersebut masih tergolong lebih terjangkau dibandingkan harga yang ditawarkan oleh pengecer di sekitar wilayah Tatah Makmur, yang bahkan bisa mencapai angka yang jauh lebih tinggi. Dengan kata lain, meskipun ada deviasi dari HET, harga di pangkalan masih dianggap lebih murah dan wajar oleh masyarakat setempat.

Strategi penetapan harga seperti ini ditempuh sebagai langkah adaptif untuk tetap mempertahankan keberlangsungan usaha sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan akses LPG yang legal, terjamin, dan relatif terjangkau. Dalam praktiknya, pangkalan-pangkalan resmi juga berupaya menjaga kepercayaan

konsumen dengan memastikan kualitas pelayanan tetap baik, seperti memberikan layanan cepat, menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan, serta memastikan ketersediaan stok agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan gas saat dibutuhkan.

Lebih dari itu, keberadaan pangkalan resmi masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat karena faktor legalitas distribusi dan jaminan ketersediaan barang. Ketika pengecer menjual dengan harga lebih mahal dan tidak memiliki jaminan keberlanjutan pasokan, masyarakat cenderung memilih membeli dari pangkalan yang dinilai lebih dapat dipercaya. Persaingan ini pada akhirnya juga mendorong para pelaku usaha pangkalan untuk terus berinovasi dalam pelayanan dan menjalin hubungan yang baik dengan konsumen, demi mempertahankan loyalitas dan keunggulan dalam distribusi LPG 3 kg di wilayah tersebut.

4) Pandangan Masyarakat terhadap Barang

Gas LPG 3 kg saat ini dipandang oleh sebagian besar masyarakat sebagai salah satu barang kebutuhan pokok yang sangat penting dan tidak dapat digantikan dengan mudah. Pandangan ini muncul karena gas LPG digunakan untuk keperluan memasak sehari-hari di rumah tangga, sehingga ketersediaannya menjadi hal yang sangat krusial. Masyarakat memandang bahwa gas LPG harus tersedia secara berkesinambungan, tanpa terputus, karena perannya yang langsung berdampak pada aktivitas dapur dan konsumsi keluarga. Akibatnya, permintaan terhadap gas LPG 3 kg tetap tinggi, bahkan ketika harga produk tersebut mengalami kenaikan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih akan membeli gas LPG 3 kg meskipun harganya lebih mahal dari HET, selama kenaikan tersebut

masih berada dalam batas yang dianggap wajar. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa konsumen seperti Ibu Zahra, Ibu Zainab, dan Bapak Akbar, diketahui bahwa sebagian besar konsumen tetap memilih untuk membeli gas LPG karena pertimbangan kepraktisan serta kebutuhan yang bersifat mendesak. Mereka menyatakan bahwa memasak adalah kebutuhan harian yang tidak bisa ditunda, sehingga meskipun harga naik, mereka tetap akan mencari cara untuk mendapatkannya. Bahkan, sebagian dari mereka menyampaikan bahwa ketersediaan barang menjadi faktor yang lebih penting dibandingkan dengan selisih harga. Dalam hal ini, mereka lebih memilih membayar lebih mahal daripada tidak bisa memasak sama sekali.

Pandangan masyarakat yang demikian membuka peluang bagi para pelaku usaha, khususnya pengecer atau agen gas, untuk menetapkan harga jual yang sedikit lebih tinggi dari HET. Namun, penyesuaian harga ini umumnya dapat diterima oleh konsumen selama ada transparansi dalam informasi serta kesepahaman antara penjual dan pembeli. Artinya, jika alasan kenaikan harga disampaikan secara terbuka dan logis seperti karena biaya distribusi, kelangkaan stok, atau faktor lain yang mempengaruhi rantai pasok maka masyarakat cenderung dapat memahami dan menerima kondisi tersebut.

Fenomena ini mencerminkan bahwa persepsi masyarakat terhadap nilai suatu barang, terutama barang yang menyangkut kebutuhan dasar sehari-hari, sangat tinggi. Dalam konteks gas LPG 3 kg, persepsi nilai ini bahkan dapat mengalahkan pertimbangan rasional terhadap harga. Selama konsumen merasa bahwa produk tersebut memenuhi kebutuhan esensial mereka dan tersedia saat

dibutuhkan, maka mereka bersedia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan harga. Oleh karena itu, dalam praktiknya, penyesuaian harga menjadi hal yang secara sosial dapat diterima, asalkan dilakukan secara wajar dan disertai komunikasi yang baik antara penjual dan pembeli.

5) Kedudukan Perusahaan dalam Pasar

Kedudukan pangkalan sebagai satu-satunya atau salah satu dari sangat sedikit distributor resmi LPG di beberapa wilayah Desa Tatah Makmur memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap mekanisme penetapan harga di tingkat lokal. Dalam konteks distribusi LPG bersubsidi yang diatur oleh pemerintah, idealnya harga jual ke konsumen akhir mengikuti ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dalam situasi di mana jumlah pangkalan terbatas dan akses masyarakat terhadap alternatif distribusi sangat minim, harga LPG cenderung lebih fleksibel dan dapat disesuaikan oleh pemilik pangkalan berdasarkan berbagai pertimbangan internal mereka.

Ketika hanya terdapat satu pangkalan di suatu wilayah atau desa, masyarakat secara praktis tidak memiliki banyak pilihan untuk memperoleh LPG. Ketergantungan yang tinggi terhadap satu sumber pasokan ini menciptakan kondisi di mana pemilik pangkalan berada dalam posisi tawar yang kuat. Artinya, mereka memiliki kendali yang lebih besar terhadap harga jual dibandingkan jika terdapat banyak pesaing atau distributor alternatif yang beroperasi di wilayah yang sama. Dalam situasi seperti ini, pasar menjadi tidak kompetitif, dan kekuatan pasar cenderung berpusat pada pihak pangkalan itu sendiri.

Pemilik usaha pangkalan dalam kondisi seperti ini dapat lebih leluasa menetapkan harga jual LPG, karena mereka tahu bahwa konsumen tidak memiliki banyak opsi lain. Penetapan harga tidak lagi hanya berdasarkan pada HET, tetapi turut mempertimbangkan kondisi operasional internal yang dihadapi oleh pangkalan. Misalnya, ongkos distribusi dari agen ke pangkalan bisa menjadi lebih tinggi apabila jarak tempuhnya jauh atau infrastruktur jalan yang dilalui buruk. Selain itu, biaya tenaga kerja, biaya pemeliharaan sarana distribusi, serta pengeluaran operasional harian lainnya menjadi komponen-komponen penting yang turut memengaruhi penentuan harga jual. Dalam hal ini, harga yang dikenakan kepada konsumen menjadi semacam cerminan dari beban usaha yang ditanggung oleh pemilik pangkalan.

Meskipun harga yang dikenakan oleh pangkalan terkadang berada di atas HET, masyarakat di Desa Tatah Makmur tetap memilih untuk membeli LPG dari pangkalan tersebut. Berdasarkan penuturan para pelaku usaha dan pengamatan di lapangan, alasan utama dari pilihan ini adalah karena lokasi pangkalan umumnya lebih dekat dengan permukiman warga, sehingga lebih mudah dijangkau tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi. Selain itu, harga yang ditawarkan pangkalan meskipun melebihi HET masih dianggap lebih murah dibandingkan pengecer atau pihak ketiga lainnya yang biasanya mengambil margin keuntungan lebih besar karena mereka pun harus membeli dari pangkalan terlebih dahulu.

Dengan kata lain, faktor kenyamanan, kedekatan lokasi, dan kepraktisan menjadi pertimbangan utama masyarakat dalam membeli LPG. Situasi ini

menciptakan semacam loyalitas pasar terhadap pangkalan, yang secara tidak langsung memperkuat posisi pangkalan dalam menentukan harga. Dalam banyak kasus, masyarakat memilih untuk "menerima" harga yang ditawarkan karena mempertimbangkan kemudahan akses dan efisiensi biaya total, meskipun secara aturan harga tersebut sedikit menyimpang dari ketentuan resmi.

2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Gas Lpg 3 Kg Di Pangkalan Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.

Dalam hal jual beli penetapan harga atas barang sangat diperlukan untuk kelangsungan bisnis yang dijalankan. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dalam jual beli. (Antonio, 2001)

Bentuk penentuan harga yang dilarang dalam islam antara lain menentukan harga yang berlebihan (*predatory pricing*), diskriminasi penentuan harga yang berakibat pada ketidakadilan dan penipuan dalam menentukan harga. Dalam Al-Qur'an secara jelas Allah SWT. Melarang praktik kecurangan dalam timbangan sebagai bagian dari kebijakan penentuan harga sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. AlMuthaffifin [83]:1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila meneima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”

Dari penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan penetapan harga dalam sistem ekonomi islam, harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Tidak memberikan kesan palsu pada pelanggan atau memperoleh satu informasi harga.
- b. Tidak boleh mendapatkan sesuatu tanpa kerja keras (maisir), atau menerima keuntungan tanpa bekerja.
- c. Mengubah harga harus diikuti perubahan kuantitas dan kualitas produk.
- d. Menghindari tindakan menipu pelanggan demi keuntungan.
- e. Tidak diskriminasi harga pada semua konsumen.
- f. Dilarang iklan palsu melalui media.
- g. Memiliki control harga untuk memenuhi kebutuhan pasar atau menghindari kelangkaan sumber daya alam.
- h. Tidak boleh menimbun barang (al-ihthikar dalam konsep islam).(Dheddy Abdi Tamba et al., 2025)

Dalam sistem ekonomi Islam, penetapan harga (*tas'ir*) memiliki landasan yang kuat dalam prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Penetapan harga tidak boleh dilakukan secara sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual hanya demi meraih keuntungan sebesar-besarnya, apalagi sampai menimbulkan kerugian dan kesulitan pada pihak pembeli. Islam menolak praktik ekonomi yang mengandung unsur kezaliman (*zulm*), penipuan (*tadlis*), dan ketidakjelasan (*gharar*). Oleh karena itu, dalam Islam, penetapan harga harus memperhatikan asas *al-'adalah*

(keadilan), *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum), dan kerelaan antar pihak (*taradhi*) (Ismail, 2018).

Merujuk pada kondisi aktual di lapangan, yaitu dalam penjualan Gas LPG 3 kg di beberapa pangkalan di Kecamatan Tatah Makmur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0385/KUM/2022 telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 18.500 per tabung di tingkat pangkalan. Kebijakan ini merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok yang sangat vital bagi masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah. Intervensi pemerintah seperti ini dalam ekonomi Islam disebut dengan istilah *tas'ir*. (Zuhayli, 2007)

Secara etimologis, *tas'ir* berasal dari bahasa Arab “*sa'ara - yas'aru - sa'ran*” yang berarti menyalakan. Kata ini kemudian membentuk istilah *as-si'r* dan *as'ar*, yang berarti harga. Secara terminologi *syar'i*, para ulama mendefinisikan *tas'ir* sebagai tindakan penguasa atau pemerintah yang memerintahkan para pedagang agar tidak menjual suatu barang kecuali dengan harga tertentu yang telah ditetapkan, dan melarang mereka untuk menaikkan atau menurunkan harga di luar batas tersebut. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga stabilitas harga di pasar, menghindari monopoli, serta mencegah kerugian yang dapat menimpa konsumen akibat ulah segelintir pedagang yang ingin mengambil keuntungan secara tidak wajar.

Dalam Islam, kebijakan *tas'ir* diperbolehkan dalam situasi-situasi tertentu, terutama ketika mekanisme pasar tidak berjalan sebagaimana mestinya dan terjadi

ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan yang menyebabkan harga melonjak secara tidak rasional. Hal ini pernah terjadi di masa Rasulullah ﷺ, dan beliau tidak melakukan *tas'ir* ketika kenaikan harga masih merupakan hasil alami dari mekanisme pasar. Namun, para ulama seperti Imam Ibn Taimiyah dan Imam Al-Ghazali membolehkan *tas'ir* ketika ada indikasi penimbunan (*ihthikar*), permainan harga oleh kartel, atau ketika harga barang pokok menjadi terlalu tinggi dan memberatkan masyarakat luas. Dalam kondisi seperti itu, *tas'ir* menjadi bentuk perlindungan terhadap konsumen sekaligus menjaga keadilan sosial.

Berkaitan dengan kondisi di Kecamatan Tatah Makmur, ditemukan bahwa beberapa pangkalan menetapkan harga jual Gas LPG 3 kg dengan nominal yang berbeda-beda, meskipun HET telah ditentukan oleh pemerintah. Perbedaan harga tersebut sebagian besar disebabkan oleh variasi dalam biaya operasional, seperti adanya biaya transportasi dari agen ke pangkalan, biaya jasa angkut, serta biaya tenaga kerja bagi pangkalan yang memperkerjakan karyawan. Oleh karena itu, pangkalan yang tidak memperkerjakan karyawan atau memiliki akses distribusi yang lebih dekat cenderung menjual dengan harga yang lebih rendah, sementara pangkalan yang memiliki beban biaya lebih tinggi menetapkan harga yang sedikit lebih mahal dari HET.

Dari perspektif ekonomi Islam, perbedaan harga tersebut dapat ditoleransi selama masih dalam batas kewajaran dan tidak menyalahi prinsip keadilan. Selama harga ditentukan berdasarkan pertimbangan biaya operasional yang nyata dan tidak dimaksudkan untuk mengambil keuntungan yang berlebihan, maka praktik tersebut tidak termasuk dalam kategori kezaliman. Namun, apabila terdapat pangkalan yang

menjual dengan harga yang jauh melebihi HET tanpa justifikasi yang masuk akal, atau bahkan menjual di atas harga pasar untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Dalam jual beli menurut Islam, unsur suka sama suka (*an-tarada*) merupakan syarat sahnya transaksi. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. An-Nisa: 29)*

Ayat ini menunjukkan bahwa segala bentuk transaksi ekonomi harus dilandasi oleh kerelaan dan tidak boleh ada unsur paksaan atau kezaliman. Jika harga suatu barang terlalu tinggi dan pembeli tidak memiliki pilihan lain karena kebutuhan mendesak, maka unsur kerelaan dalam transaksi bisa hilang, dan hal ini menjadi bentuk ketidakadilan yang harus dicegah.

Dengan demikian, penetapan harga Gas LPG 3 kg oleh pemerintah melalui kebijakan HET dapat dikategorikan sebagai *tas'ir* yang sah menurut syari'at Islam, karena bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum, mencegah praktik penipuan, dan melindungi masyarakat dari harga yang tidak wajar. Pemerintah berperan sebagai pengatur (*muraqabah*) dan pelindung pasar dalam menjaga agar tidak terjadi eksploitasi. Oleh karena itu, pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan HET di lapangan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan

tersebut benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at dan tidak hanya menjadi aturan formal tanpa implementasi nyata.

Adanya variasi harga di lapangan memang tidak sepenuhnya dapat dihindari, namun harus selalu diawasi agar tidak berkembang menjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat luas. Dalam konteks ini, prinsip *hisbah* dalam Islam menjadi sangat relevan, yaitu pengawasan terhadap praktik muamalah agar tetap dalam koridor syar'i. Para pelaku usaha juga seharusnya menanamkan etika bisnis Islami dalam aktivitasnya, sehingga keuntungan tidak menjadi satu-satunya orientasi, melainkan juga memperhatikan keberkahan dan kesejahteraan bersama.